

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KONSULTAN PENYUSUNAN *TRAINING NEED ASSESSMENT* SKK KONSTRUKSI, DI KABUPATEN TANGERANG DAN KOTA TANGERANG

1. Latar belakang

Habitat for Humanity Indonesia dan Habitat for Humanity Jerman bekerja sama dengan *Federal Ministry for Economic Co-operation and Development* (BMZ) menyusun sebuah program bertajuk **Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Banten Melalui Akses Pelatihan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) pada sektor Konstruksi**. Program ini secara umum bertujuan untuk membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kapasitas secara khusus dalam hal konstruksi dengan memfasilitasi dalam pelatihan sertifikat kompetensi kerja pada sektor Konstruksi. Selain itu juga untuk menjawab persoalan mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat dan tukang terhadap kualitas bangunan, sehingga bisa mendorong dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Tersedianya tukang konstruksi yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan nasional saat ini. Upaya tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pelatihan kerja, sesuai dengan amanat UU 23 TAHUN 2014, UU 2 TAHUN 2017, PP 22 TAHUN 2020. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.

Dalam rangka mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Habitat Indonesia, serta dalam penyusunan program pelatihan SKK Konstruksi pada level operator, perlu ada *Training Need Assessment*. Proses ini diperlukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan prosedur yang wajib sebelum suatu desain pelatihan dilaksanakan. Analisis kebutuhan sangat penting karena tanpa analisis kebutuhan yang tepat, maka program pelatihan yang dilaksanakan dipastikan tidak akan mencapai hasil yang optimal, karena tidak adanya kesesuaian antara kebutuhan yang diperlukan dengan masalah yang dihadapi.

Harapannya, dengan adanya dokumen TNA ini bisa menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dalam penyusunan perencanaan program Pelatihan SKK di sektor konstruksi secara khusus pada level operator.

2. Dasar hukum dan kebijakan pelaksanaan kegiatan TNA:

- a. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- b. Permenakertrans Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah.
- c. Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

3. Tujuan

Tujuan dari KAK ini antara lain:

- a. Sebagai acuan untuk mendapatkan konsultan yang memiliki pengetahuan, kompetensi, kapasitas, dan kualifikasi dalam Penyusunan *Training Need Assessment* di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
- b. Sebagai acuan bagi konsultan penyusunan TNA dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan SKK sektor konstruksi di level operator yang dibutuhkan di pasasr kerja di Kabupaten dan Kota Tangerang

4. Output

Output atau keluaran antara lain:

- a. Data *supply* kebutuhan tukang kosntruksi di level operator di Kabupaten dan Kota Tangerang.
- b. Data *demand* kebutuhan tukang kosntruksi di level operator di Kabupaten dan Kota Tangerang.
- c. Data minat masyarakat di Kabupaten dan Kota Tangerang terhadap bidang konstruksi.
- d. Hasil analisis data
- e. Dokumen *Training Need Assessment*

5. Lokasi dan Lingkup kerja

Lingkup kerja antara lain:

- a. Lokasi untuk KAK ini adalah di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
- b. Menyusun lini masa (timeline) dan melakukan koordinasi dengan tim Habitat Indonesia, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. (Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BLK, Gapensi, Asosiasi Tukang Bangunan, Pokja PKP, dan berbagai forum lainnya yang berkaitan dengan kontruksi dan pelatihan sertifikasi tukang).
- c. Membuat Kerangka Acuan Kegiatan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi: latar belakang, tujuan, output, pelaksanaan kegiatan, daftar peserta.
- d. Membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan bersama pihak terkait.
- e. Menyusun Dokumen *Training Need Assessment* di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
- f. Menyusun rangkuman dokumen *Training Need Assessment* dalam Bahasa Inggris.
- g. Membuat laporan kegiatan yang berisi:
 - Laporan naratif
 - Foto dokumentasi selama kegiatan
 - Presensi kehadiran peserta.

6. Kriteria konsultan:

- a. Sebuah lembaga/instansi /universitas atau perorangan.
- b. Memiliki sertifikat TNA dari BNSP
- c. Apabila sebuah perusahaan, harus memiliki: Akta Lembaga, NIB, SIUP, dan NPWP
- d. Memiliki latar belakang pendidikan S1 atau S2 di bidang hukum, teknik sipil/arsitek, administrasi negara.
- e. Memiliki pengalaman dalam penyusunan dokumen *Training Need Assesment* dengan desain yang menarik.
- f. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam sistem hukum Jasa Konstruksi di Indonesia dan pelaksanaannya di tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Memiliki pengalaman dan relasi dengan pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, secara khusus: Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, BLK (menjadi nilai tambah).

7. Kelengkapan calon konsultan adalah sebagai berikut:

- a. *Cover letter*
- b. Proposal teknis yang mencakup proposal keuangan;
- c. Proposal teknis harus memiliki lampiran-lampiran sebagai berikut:
 1. Profil:
 - Konsultan lembaga/badan/universitas: profil lembaga/badan, CV terbaru tim konsultan
 - Konsultan perorangan: CV terbaru
 2. Dua (2) contoh laporan TNA sebelumnya yang telah dihasilkan atau ringkasan eksekutifnya.

8. Pengiriman dokumen dan kontak

Pengiriman dokumen proposal asli dikirimkan langsung ke kantor Habitat for Humanity Indonesia dengan cara sebagai berikut:

- a. Dokumen proposal asli (Hard file) terdiri dari 2 bagian secara terpisah:
 1. Dokumen proposal biaya pelaksanaan TNA dimasukkan ke dalam amplop A4 tertutup langsung dimasukkan ke dalam peti yang tersegel (Sealed Box) di front desk dan melakukan pendaftaran di kantor Habitat Indonesia.
 2. Dokumen pendukung lain seperti dokumen profile organisasi/perorangan, teknis dan lainnya dimasukkan ke dalam amplop terpisah diserahkan sewaktu melakukan pendaftaran tersebut.
- b. Kedua dokumen tersebut ditujukan kepada: **Bp Arwin Soelaksono (Habitat for Humanity Indonesia Program Director), Alamat: Habitat for Humanity Indonesia National Office at: ATRIA@Sudirman, 18 Floor, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 33A, RT.3/RW.2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat – 10220.**
- c. Batas waktu pengiriman proposal pada 19 November 2024 jam 16:00 WIB (pengiriman melebihi batas waktu yang ditentukan TIDAK AKAN DIPROSES)